

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Judul SOP Mikro

Nomor SOP OT.01.02-050-053.De.1 Tanggal Pembuatan Jumat, 27 Oktober 2017 Tanggal Revisi Revisi ke Tanggal Efektif Rabu, 02 Mei 2018 Plt. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Janiruddin, S.H., M.Si NIP. 195910081983031001

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Kedeputian BidKoor Politik Dalam Negeri

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :				
1. Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata	1. Mengetahui dan memahami aturan dan praktek dukungan administrasi bidang				
Kerja Kemenko Polhukam	kepegawaian yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada				
2. Peraturan Menko Polhukam Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas	2. Mampu berbahasa indonesia dengan baik dan benar				
Kemenko Polhukam	3. Memiliki inisiatif dan langkah antisipatif				
3. Peraturan Menko Polhukam Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip	4. Mampu menjaga penampilan				
Kemenko Polhukam	5. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik				
4. Peraturan Menko Polhukam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP Kemenko Polhukam	6. Mampu mengoperasikan komputer program microsoft office dan internet dengan baik				
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan :				
1. SOP Makro Dukungan Administrasi di lingkungan Deputi BidKoor Politik Dalam	1. Alat Tulis Kantor (ATK), Filling Kabinet, lemari besi				
Negeri	2. Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop)				
	3. Kendaraan roda dua dan empat				
	4. Telepon, Faksimile, dsb				
Peringatan:	Pencatatan dan pendataan :				
Apabila pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Deputi tidak sesuai	-				
SOP maka hasilnya kurang maksimal					

SOP Mikro Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Kedeputian BidKoor Politik Dalam Negeri

	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
No.		Sesdep	Kabag TU dan Umum	Kasubbag Umum	Pelaksana (JP)	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Memberikan arahan kepada Kabag untuk memberikan dukungan/pelayanan teknis administrasi kepegawaian di lingkungan Deputi BidKoor Politik Dalam Negeri sesuai dengan program kerja					Program kerja	5 Menit	Disposisi/arahan Sesdep	
2	Melakukan koordinasi dan konsultasi teknis dengan unit organisasi terkait (Biro Umum) dan memberikan arahan teknis kepada Kasubbag Umum terkait pelaksanaan pemberian layanan dukungan teknis administrasi kepegawaian di lingkungan Deputi BidKoor Politik Dalam Negeri sesuai dengan program kerja					Disposisi/arahan Sesdep	10 Menit	Disposisi/arahan teknis	
3	Pelaksanaan pemberian layanan dukungan teknis administrasi kepegawaian berupa cuti, surat ijin, penyusunan SKP, dan kelengkapan kenaikan pangkat kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi BidKoor Politik Dalam Negeri				→	Disposisi/arahan teknis	60 Menit	Layanan teknis administrasi kepegawaian	
4	Menyusun konsep laporan pemberian layanan administrasi kepegawaian di lingkungan Deputi BidKoor Politik Dalam Negeri untuk dilaporkan kepada Kabag Tata Usaha dan Umum		Т	→		Layanan teknis administrasi kepegawaian	120 Menit	Konsep laporan pemberian dukungan adminstrasi kepegawaian	
5	Memeriksa konsep laporan pemberian layanan administrasi kepegawaian di lingkungan Deputi BidKoor Politik Dalam Negeri untuk disampaikan kepada Sesdep	т	Y			Konsep laporan pemberian dukungan adminstrasi kepegawaian	20 Menit	Konsep laporan laporan pemberian dukungan adminstrasi kepegawaian yang telah diperiksa	
6	Memeriksa dan menandatangani laporan pemberian layanan administrasi kepegawaian di lingkungan Deputi BidKoor Politik Dalam Negeri, dan dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan dukungan teknis administrasi kepegawaian di lingkungan Deputi BidKoor Politik Dalam Negeri	Y				Konsep laporan laporan pemberian dukungan adminstrasi kepegawaian yang telah diperiksa	10 Menit	Hasil laporan pemberian dukungan adminstrasi kepegawaian	